SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA KORPORASI NONBANK DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Piutang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Piutang ...

- a. Piutang terdiri atas piutang usaha kepada Penduduk dan bukan Penduduk yang akan jatuh waktu:
- 1) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
 - 2) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan;
- yang bersifat jual putus atau tidak dapat dikembalikan dan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.
- b. Piutang usaha kepada Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang telah memiliki kontrak atau perjanjian yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.
- c. Piutang usaha kepada Penduduk yang kontrak atau perjanjiannya ditandatangani sejak tanggal 1 Juli 2015 dapat tetap dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang:
- 1) berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia; atau
 - 2) transaksi yang mendasarinya diperkenankan dilakukan dalam Valuta Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Penentuan proyek infrastruktur strategis sebagaimana dimaksud dalam butir c.1) dibuktikan dengan:
- 1) surat keterangan dari kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang; dan
 - 2) surat persetujuan dari Bank Indonesia.

e. Untuk ...

- e. Untuk piutang usaha sebagaimana dimaksud dalam butir c.2) dibuktikan dengan surat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan butir I.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Kewajiban Valuta Asing

1. Kewajiban Valuta Asing merupakan seluruh kewajiban Valuta Asing kepada Penduduk maupun bukan Penduduk termasuk kewajiban yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* yang akan jatuh waktu:
 - a. sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
 - b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
2. Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu dapat tidak diperhitungkan sebagai Kewajiban Valuta Asing jika:
 - a. sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing*, sepanjang transaksi yang mendasarinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - b. merupakan Kewajiban Valuta Asing dalam rangka *project financing* yang akan jatuh waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan selama telah dijamin oleh penarikan ULN Valuta Asing dimana jadwal penarikan tersebut disesuaikan dengan Kewajiban Valuta Asing yang harus dibayarkan dan kegiatan transaksinya sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh:

PT A membangun proyek infrastruktur di Indonesia berupa pembangkit tenaga listrik dengan fasilitas pembiayaan ULN dari Bank Z di Amerika Serikat yang berjangka waktu 10 tahun. PT A memiliki serangkaian Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu kepada kontraktor pembangunan proyek yakni PT B berdasarkan perjanjian yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015. Untuk memenuhi serangkaian Kewajiban Valuta Asing kepada PT B tersebut, PT A melakukan penarikan dana ULN dari Bank Z yang jadwal penarikannya disesuaikan dengan serangkaian Kewajiban Valuta Asing kepada PT B.

Dalam hal ini, PT A dapat tidak memperhitungkan serangkaian Kewajiban Valuta Asing kepada PT B yang akan jatuh waktu sebagai Kewajiban Valuta Asing.

3. Dokumen pendukung untuk kewajiban Valuta Asing yang sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a antara lain berupa:
 - a. notifikasi dari kreditor bahwa Kewajiban Valuta Asing dimaksud sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing*;
 - b. perjanjian ULN dengan klausul yang relevan; dan
 - c. surat persetujuan Bank Indonesia, apabila transaksi yang mendasarinya membutuhkan persetujuan Bank Indonesia agar dapat dilakukan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Dokumen pendukung untuk kewajiban Valuta Asing dalam rangka *project financing* yang dibiayai dari penarikan ULN Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b antara lain berupa:
 - a. perjanjian ULN yang menunjukkan jadwal penarikan dana pinjaman disesuaikan dengan kewajiban yang harus dibayarkan;
 - b. pernyataan korporasi bahwa ULN tersebut digunakan untuk memenuhi Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan; dan
 - c. surat persetujuan Bank Indonesia, apabila transaksi yang mendasarinya membutuhkan persetujuan Bank Indonesia agar dapat dilakukan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketentuan butir I.E.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Dalam hal Korporasi Nonbank yang baru berdiri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 didirikan oleh beberapa perusahaan (*joint venture*), pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dapat menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) pemegang saham terbesar yang memiliki hubungan kepemilikan langsung (*direct shareholders*).

Contoh:

Korporasi A didirikan oleh beberapa perusahaan (*joint venture*) yaitu perusahaan domestik (Korporasi B) dan perusahaan luar negeri (Korporasi C), dan beroperasi secara komersial pada tanggal 30 Juli 2015. Korporasi B menguasai 75% dari keseluruhan saham Korporasi A, sisanya sebesar 25% dikuasai oleh Korporasi C. Dalam melakukan pembiayaan, Korporasi A bermaksud

melakukan ...

melakukan utang luar negeri yang berasal dari sindikasi perbankan di luar negeri dan ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 2016. Dalam hal ini, Korporasi A wajib memenuhi minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) BB- dengan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang dimiliki Korporasi A atau menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang dimiliki Korporasi B hingga tanggal 30 Juli 2018.

4. Ketentuan angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. KORESPONDENSI

1. Penyampaian surat, pertanyaan, dokumen pendukung, dan/atau informasi lainnya berkaitan dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini ditujukan kepada :

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Telepon : 021-29817020, 021-29817022, 021-29817023,
021-29817025, 021-29817029, 021-29817030,
021-29817042, 021-29817053, 021-29817063,
021-29817067

Faksimili : 021-3800134, 021-3501974

E-mail : LLDKPPK@bi.go.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

5. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JUDA AGUNG
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/18/DKEM TANGGAL 30 JUNI 2015
 PERIHAL
 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK
 INDONESIA NOMOR 16/24/DKEM
 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PERIHAL
 PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
 DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR
 NEGERI KORPORASI NONBANK

**DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA
 UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
 DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK**

	Nama Lembaga Pemeringkat	Peringkat Setara BB-
Lembaga Pemeringkat Dalam Negeri	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	_{id} BB-
	PT. Fitch Ratings Indonesia	BB-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr]BB-
Lembaga Pemeringkat Luar Negeri	Moody's Investors Service	Ba3
	Standard & Poor's	BB-
	Fitch Ratings	BB-
	Japan Credit Rating Agency	BB-
	Rating and Investment Information Inc.	BB-

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
 EKONOMI DAN MONETER,

JUDA AGUNG